



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Ratahan - Belang Ket. Wawali Pasan (Komp. Perkantoran Blok B)

RATAHAN

KODE POS. 95695

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**  
**NOMOR : 33/ DPMPTSP/IOL/MT/VIII-2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL**

**KEPADА LEMBAGA PKBM SARAH**

**PENDIDIKAN NON FORMAL INFORMAL**

**KELURAHAN TOSURAYA SELATAN KECAMATAN RATAHAN**

**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;**

Menimbang

- bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
- bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus-menerus tentang peran dan tanggungjawab Sekolah/Badan penyelenggara;
- bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada **LEMBAGA PKBM SARAH** Kelurahan Tosuraya Selatan Kecamatan Ratahan dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 36 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 36 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
15. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara
16. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pendeklasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Minahasa Tenggara

**Memperhatikan** : 1. Pedoman umum pelaksanaan program Pendidikan non formal;  
2. Berkas Permohonan Lembaga PKBM SARAH Nomor :510.44/420/776 dan evaluasi kelayakan untuk mengeluarkan Ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : Memberikan Ijin Operasional kepada :

**Nama Lengkap** : ROOSJE ARIKALANG  
**Nama Lembaga** : PKBM SARAH  
**Alamat** : KELURAHAN TOSURAYA SELATAN  
**Kecamatan** : RATAHAN  
**Kabupaten** : MINAHASA TENGGARA

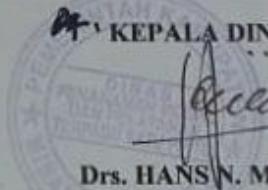
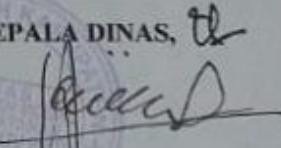
**KEDUA** : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan 30 Agustus 2025

**KETIGA** : Pemegang Ijin berkewajiban
 

1. Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Non Formal penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;
3. Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara;
4. Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Ijin Operasional akan di cabut.

**KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;  
**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan  
 Pada Tanggal : 31 Agustus 2020

  
 KEPALA DINAS, 

Drs. HANS N. MOKAT  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19630323 198303 1 016

### Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
5. Kepala Balitbang KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
7. Arsip